



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 183 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 183) diubah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

BUPATI SIAK, 


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 65

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan PEGAWAS	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Sekretaris Daerah	1					
	b. Asisten Pemerintahan dan Kesra	1					
	c. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	1					
	d. Asisten Administrasi Umum	1					
	e. Staf Ali Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1					
	f. Staf Ali Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1					
	g. Staf Ali Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1					
	a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan		1				
	1) Kasubag Tata Pemerintahan			1			
	1) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				3		
	2) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2		
	3) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
	2) Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan			1			
	1) Analis Pemerintahan Daerah				2		
	2) Pengelola Administrasi Pemerintahan				2		
	3) Pengelola Perangkat Kecamatan				2		
	3) Kasubbag Toponimi dan Batas Wilayah			1			
	1) Analis Batas Wilayah				2		
	2) Pengelola Toponimi				2		
	b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		1				
	1) Kasubbag Bina Mental dan Keagamaan			1			
	1) Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Umrah				2		
	2) Penyusunan Bahan Pembinaan Musabagah				1		
	3) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan				4		
	4) Pemandu Kerukunan Umat Beragama				3		
	2) Kasubbag Kesejahteraan Rakyat			1			
	1) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat				1		
	2) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah				3		
	3) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				2		
	c. Kepala Bagian Pertanahan		1				
	1) Kasubbag Pengukuran dan Pemetaan			1			
	1) Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan				2		
	2) Pengelola Alat Pengukuran dan Pemetaan				1		
	2) Kasubbag Fasilitas Penyelesaian Pertanahan			1			
	1) Pemeriksa Pertanahan				2		
	2) Pengelola Data Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan				1		
	3) Kasubbag Penataan, Penggunaan dan Pengelolaan Hak Atas Tanah				1		
	1) Analis Pertanahan					2	
	2) Pengelola Data Hak Atas Tanah					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian							
1) Kasubbag Produksi Daerah	1						
1) Pengelola Data			1		1		
2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi					1		
2) Kasubbag Bina Usaha Perekonomian				1			
1) Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha					1		
2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian					1		
3) Kasubbag BUMD				1			
1) Analis Perencanaan Bisnis					1		
2) Penelaah Perkembangan BUMD					1		
e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1						
1) Kasubbag Kebijakan dan Program				1			
1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1	1		
2) Kasubbag Pengendalian				1			
1) Pengelola Pengawasan				1	1		
3) Kasubbag Pelaporan							
1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan					3		
2) Pengadministrasi Anggaran					2		
f. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1						
1) Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa				1			
1) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa					18		
2) Analis Lelang					3		
3) Pengelola Unit Layanan Pengadaan					2		
4) Pengadministrasi Persuratan					1		
5) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama						21	
6) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda						8	
7) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya						2	
2) Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1			
1) Analis Data dan Informasi					4		
2) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik					3		
3) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1		
3) Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				1			
1) Analis Pengembangan SDM Aparatur					1		
2) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa					2		
g. Kepala Bagian Organisasi							
1) Kasubbag Kelembagaan	1			1			
1) Analis Kelembagaan					2		
2) Pengolah Data Kelembagaan					2		
3) Pengadministrasi Pemerintahan					2		
2) Kasubbag Analisa Jabatan dan Aparatur				1			
1) Analis Jabatan					2		
2) Analis Kompetensi					2		
3) Pengadministrasi Kepegawaian					2		
3) Kasubbag Tata Laksana				1			
1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja					2		
2) Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan					2		
3) Penyusun Bahan Kebijakan					2		
h. Kepala Bagian Hukum							
1) Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	1			1			
1) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan					2		
2) Penyusun Rancangan Perundang-Undangan					2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengelola Peraturan Perundang-Undangan				2		
	2) Kasubag Dokumentasi Hukum			1	2		
	1) Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum				2		
	2) Pengadministrasi Hukum			1	2		
	3) Kasubag Bantuan Hukum dan HAM				3		
	1) Analis Advokasi Hukum				1	15	
	2) Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia					8	
	3) JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama					5	
	4) JF Penyuluh Hukum Ahli Muda						
	5) JF Penyuluh Hukum Ahli Madya						
	i. Kepala Bagian Umum		1				
	1) Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga			1	33		
	1) Analis Aset Daerah				2		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	3) Pengelola Kendaraan				5		
	4) Pengemudi				2		
	5) Penjaga Asrama			1			
	2) Kasubag TU, Pimpinan dan Staf Ahli				2		
	1) Analis Tata Usaha				3		
	2) Ajudan				6		
	3) Sekretaris				4		
	4) Pengadministrasi Persuratan				3		
	5) Pranata Jaminan			1			
	3) Kasubag Keuangan				1		
	1) Bendahara				1		
	2) Penyusun Laporan Keuangan				2		
	3) Verifikator Keuangan				5		
	4) Pengelola Perjalanan Dinas				3		
	5) Pengelola Gaji				3		
	j. Kepala Bagian Humas dan Protokol		1	1			
	1) Kepala Bagian Humas dan Protokol				3		
	1) Analis Humas				8		
	2) Jurnalis				3		
	3) Pengelola Pengaduan Publik				3		
	4) Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media			1	2		
	2) Kasubag Protokol				8		
	1) Analis Protokol				4		
	2) Petugas Protokol						
	3) Pranata Acara						
	Jumlah	7	10	28	229	59	
	Jumlah Total			333			

BUPATI SIAK, *fs*

ALFEDRI